



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HADI SUWONO
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 656364

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m²/60 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 151 m²/180 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.850.000.000
3. Tanah Seluas 240 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 980.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/58 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
5. Tanah Seluas 3433 m² di KAB / KOTA PATI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 147.300.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000
4. MOBIL, HONDA BRIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.350.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 988.250.972



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ---
Rp. 6.350.900.972

III. HUTANG

Rp. ---
Rp. 6.350.900.972

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.